GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 20 Juli 2006**
Subyek	**: KEREUSAKAN HUTAN**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: 4**

Empat Juta Hektare Hutan di Kalteng Rusak Parah

[PALANGKARAYA] Sedikitnya empat juta hektare kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami kerusakan yang sangat parah.

Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalteng Ir Sri Sayuto kepada wartawan di Palangkaraya, Rabu (19/7), mengatakan, kerusakan hutan itu merupakan beban yang sangat berat dalam merehabilitasi. Dibutuhkan pendanaan yang besar dan waktu pelaksanaan reboisasi memakan waktu yang sangat lama.

Kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan di Kalteng hanya mencapai 50.000 hektare per tahun. Dari prediksi kemampuan rehabilitasi ini, dapat dihitung untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak parah tersebut dibutuhkan waktu paling sedikit sekitar 80 tahun.

Dikatakan, asumsi seperti itu hanya berlaku bila tiap tahun tidak lagi terjadi kerusakan hutan. Namun kenyataan yang dihadapi, kegiatan pembalakan liar *(illegal logging)* di provinsi ini masih terus terjadi. Upaya penertiban penebangan kayu secara liar yang kurang diikuti tindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku membuat pembabatan hutan masih berlangsung sampai sekarang.

Diungkapkan, akibat kegiatan pembalakan liar tidak kurang dari 150.000 hektare hutan setiap tahun mengalami kerusakan. "Rehabilitasi hutan di daerah ini tidak pernah selesai jika pemerintah tidak melakukan antisipasi menanggulangi penambahan kerusakan hutan yang kini masih belum bisa dihentikan," ujarnya.

Ditambahkan, rencana pemerintah membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektare di Kalteng perlu disikapi secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, banyak pihak yang cuma berencana tapi tidak mewujudkan. Mereka hanya mengambil kayunya tanpa mengerjakan lahan itu secara serius untuk dijadikan perkebunan," kata Ir Sri Sayoto.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Ir Achmad Diran dalam kesempatan terpisah ketika dikonfirmasi mengatakan, permasalahan pembalakan liar menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah selama periode 2006 -1010.

Prioritas

Wagub mengatakan, prioritas kebijakan itu karena dampak pembalakan liar sangat luas. Diantaranya peningkatan luas degradasi hutan, kerusakan dan pemusnahan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah serta rusaknya ekosistem hutan.

Ditandaskan, penebangan hutan yang tidak terkendali membuat perubahan iklim lokal, regional bahkan global serta peningkatan potensi kebakaran hutan.

"*Illegal logging* termasuk masalah yang rumit diatasi karena terkait erat dengan permasalahan sosial ekonomi lain, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian yang sulit," tandas Wagub.

Selain itu, sempitnya lapangan pekerjaan dan lemahnya penegakan hukum ikut memperparah kerusakan hutan. "Kondisi ini diperparah oleh ulah segelintir oknum, yakni cukong tebangan liar maupun aparat yang sengaja memberikan peluang terjadinya penebangan liar," ujar Diran. [106]

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup